

SKRIPSI

**PENGARUH BATAS AKHIR TARIF PAJAK PP 55, MODERNISASI
SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN GIANYAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI PUTU ANDRISA TASYA KUSUMA PUTRI
NIM : 2115654047**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PENGARUH BATAS AKHIR TARIF PAJAK PP 55, MODERNISASI
SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN GIANYAR**

Ni Putu Andrisa Tasya Kusuma Putri
2115654047

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak diberlakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penurunan distorsi pajak. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto dengan potensi pajak yang besar. UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan, termasuk di Provinsi Bali. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Untuk mengatasi hal ini, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak yang baik serta pentingnya pajak bagi suatu negara. Selain itu pemerintah juga melakukan reformasi sistem perpajakan dengan modernisasi sistem perpajakan yang akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi sistem wajib pajak bisa melaporkan sendiri sesuai dengan salah satu sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self assesment system*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak dan menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Pratama Gianyar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif asosiatif. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat uji software IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Batas akhir tarif pajak PP 55 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) Batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

***THE EFFECT OF THE FINAL TAX RATE LIMIT OF PP 55,
MODERNIZATION OF THE TAX SYSTEM, AND TAXPAYER KNOWLEDGE
ON THE TAX COMPLIANCE OF MSMEs IN GIANYAR REGENCY***

**Ni Putu Andrisa Tasya Kusuma Putri
2115654047**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxes are imposed with the aim of increasing economic efficiency by reducing tax distortions. MSMEs play a significant role in the Indonesian economy, contributing approximately 60.5% to Gross Domestic Product, with substantial tax potential. MSMEs in Indonesia continue to grow, including in Bali Province. However, this potential has not been matched by optimal tax compliance levels. To address this, taxpayers must have sound knowledge and understanding of taxes and their importance to a country. Furthermore, the government is also reforming the tax system by modernizing it, which will facilitate taxpayers in fulfilling their tax obligations. With this modernization, taxpayers can report their taxes themselves, in accordance with one of Indonesia's tax systems, namely the self-assessment system. This study aims to determine the effect of the PP 55 tax rate deadline, tax system modernization, and taxpayer knowledge on MSME taxpayer compliance. This study was conducted in Gianyar Regency with a sample of 100 taxpayers and analyzed primary data from questionnaires distributed to MSME taxpayers in Pratama Gianyar Regency. This study used associative quantitative data analysis techniques. This test was conducted using the IBM SPSS Statistics 25 software testing tool. The results of this study indicate that (1) The PP 55 tax rate deadline has a negative and significant influence on MSME taxpayer compliance, (2) modernization of the tax system has a positive and significant influence on MSME taxpayer compliance, (3) taxpayer knowledge has a positive and significant influence on MSME taxpayer compliance, (4) The PP 55 tax rate deadline, modernization of the tax system and taxpayer knowledge have a simultaneous influence on MSME taxpayer compliance.

Keywords: PP 55 tax rate deadline, modernization of the tax system, taxpayer knowledge, taxpayer compliance

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Relevan	14
C. Kerangka Pikir Penelitian	16
D. Hipotesis Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	25
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	26
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	27
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	30
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Hasil Uji Hipotesis	47
C. Pembahasan.....	52
D. Keterbatasan Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP.....	56
A. Simpulan	56
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2020-2024	2
Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11
Tabel 3. 1 Bobot Skor Pilihan Respon	31
Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Peredaran Bruto	37
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha	38
Tabel 4. 4 Uji Statistik Deskriptif Variabel Batas Akhir Tarif Pajak PP 55	39
Tabel 4. 5 Uji Statistik Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan.....	40
Tabel 4. 6 Uji Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Wajib Pajak	41
Tabel 4. 7 Uji Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.....	42
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas.....	45
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas.....	45
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4. 13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	48
Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Parsial	49
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Simultan.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	18
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner.....	64
Lampiran 2: Data Karakteristik Responden dan Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden	66
Lampiran 3: Surat Permohonan Data	72
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	73
Lampiran 5: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel X1	74
Lampiran 6: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel X2	75
Lampiran 7: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel X3	76
Lampiran 8: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel Y	77
Lampiran 9: Uji Normalitas	78
Lampiran 10: Uji Multikolinieritas	78
Lampiran 11: Uji Heteroskedastisitas	79
Lampiran 12: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	79
Lampiran 13: Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	79
Lampiran 14: Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)	79
Lampiran 15: Uji Regresi Secara Simultan (Uji F).....	80
Lampiran 16: Analisis Statistik Deskriptif Variabel X1	80
Lampiran 17: Analisis Statistik Deskriptif Variabel X2	80
Lampiran 18: Analisis Statistik Deskriptif Variabel X3	81
Lampiran 19: Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkembang dan negara-negara dalam masa transisi menerapkan sistem perpajakan yang kompleks. Pajak diberlakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penurunan distorsi pajak (Barrios et al., 2020). Indonesia mengidentifikasi pajak menjadi pendapatan utama negara yang berfungsi untuk membiayai belanja negara serta pembangunan infrastruktur publik (Mayasari dan Narsa, 2020). Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menyatakan sebagian besar sumbangan di Produk Domestik Bruto berasal dari Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 60,5%, sektor ini merupakan basis potensial penting bagi penerimaan negara melalui pajak. Seiring waktu, jumlah UMKM mengalami peningkatan yang signifikan (Darmayasa et al., 2022). Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 melebihi 65 juta unit. Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia yang pesat menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah berusaha agar seluruh UMKM dapat berkontribusi bagi penerimaan negara. Salah satunya Provinsi Bali memiliki sembilan kabupaten dengan jumlah UMKM yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Buleleng	34.374	54.489	57.216	66.368	67.164
2	Jembrana	24.346	46.277	66.537	67.183	68.358
3	Tabanan	42.744	43.715	47.160	47.957	48.281
4	Badung	19.261	22.647	40.989	21.699	22.638
5	Denpasar	32.026	32.224	32.226	29.749	31.182
6	Gianyar	75.482	75.542	75.620	75.666	75.855
7	Bangli	44.068	44.123	44.175	44.251	47.957
8	Klungkung	14.584	35.792	36.072	35.792	36.114
9	Karangasem	40.468	57.456	40.614	50.717	50.951
		327.353	412.265	440.609	439.382	448.500

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali terdapat 448.500 UMKM di Bali pada tahun 2024. Data tersebut didominasi dari Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak 75.855 UMKM. Banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Gianyar yang berkontribusi terhadap perekonomian harus sejalan dengan kepatuhan perpajakannya agar penerimaan pajak optimal. Menurut Direktorat Jenderal Pajak tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar sampai dengan Mei 2025 sekitar 30,6%. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menambah wawasan dan kesadaran akan tanggung jawab kewarganegaraan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perpajakan dan sistem perpajakan perlu terus dievaluasi juga disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi (Putri dan Najicha, 2021). Pelaksanaan reformasi pajak berbeda-beda tergantung pada kondisi yang dihadapi suatu negara. Reformasi pajak dapat berupa penambahan atau pengurangan tarif pajak, perubahan lapisan ambang batas penghasilan kena

pajak, perubahan basis pajak, penerapan pajak baru, penghapusan pajak lama, perubahan komposisi penerimaan pajak, perubahan mendasar praktik dan sistem administrasi perpajakan (Cahyadi et al., 2023).

Reformasi pajak tidak hanya terbatas pada perubahan teknis atau kebijakan, melainkan juga perlu disertai dengan peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Reformasi perpajakan menjadi solusi jika *tax ratio* atau tingkat kepatuhan belum optimal (Darmayasa dan Hardika, 2024). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan tantangan dan dapat dianggap sebagai masalah besar yang dihadapi setiap negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak perorangan menyebabkan penggelapan pajak, yang akhirnya akan berujung pada pengenaan sanksi perpajakan (Putra et al., 2022). Pengembangan pada sistem perpajakan *Core System of Tax Administration* atau yang dikenal dengan *coretax* dan berakhirnya penggunaan tarif pajak final 0,5 bagi wajib pajak UMKM yang telah melakukan usaha selama 7 tahun atau lebih seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PP 55) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bagaimana masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori TPB dalam psikologi sosial mengemukakan bahwa niat untuk berperilaku membentuk perilaku manusia; sikap perilaku, norma subjektif, serta persepsi individu mengenai perilaku seseorang mempengaruhi niat untuk patuh (Ajzen, 1991). Pemicu dalam

menjalankan kewajiban perpajakan dapat berasal dari niat perilaku juga berhubungan dengan karakteristik, pengetahuan serta faktor eksternal seperti kebijakan fiskal (Fuadi dan Mangonting, 2021). Pengetahuan yang memadai akan ketentuan pajak, dapat meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk patuh (Haizumah dan Hayati, 2022). Sedangkan mencakup faktor eksternal berupa komponen dari wajib pajak seperti tarif pajak, sanksi, sistem perpajakan seperti *e-billing*, *e-filling*, *e-form*, *e-faktur* dan yang terbaru *Core System of Tax Administration* atau yang dikenal dengan *coretax*. Kemudahan dari pengguna sistem perpajakan secara digital akan mampu menghilangkan beban wajib pajak bahkan sistem perpajakan secara digital mampu meningkatkan kepatuhan secara sukarela bagi wajib pajak (Darmayasa et al., 2020)

Penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan wajib pajak menunjukkan keanekaragaman hasil atau terjadi gap penelitian. Penelitian oleh Putra (2020) menggunakan penelitian kuantitatif menunjukkan terdapat pengaruh positif baik secara terpisah maupun secara serentak dari pengetahuan pajak dan dua variabel independen lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ariyanto dan Nuswantara (2020) menjelaskan teori atribusi dan teori persepsi relevan dengan kepatuhan pajak pelaku UMKM yang dipengaruhi persepsi atas tarif pajak.

Penelitian Sinuhaji (2024) menyatakan dampak digitalisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada sistem *e-filling*. Tingkat pelayanan yang disediakan tidak menyebabkan kepatuhan pajak

meningkat. Kurangnya pemahaman terhadap layanan yang diberikan, termasuk pengetahuan tentang ketentuan kewajiban perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku. Penelitian Wijaya dan Yanti (2023) menyatakan bahwa kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh tarif pajak, tata cara pembayaran pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan, namun pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak disertai dengan kesadaran diri yang memadai, sehingga tingkat pemenuhan wajib pajak UMKM masih belum optimal.

Penelitian lebih lanjut akan menggunakan variabel dan waktu yang berbeda, dengan tujuan mengetahui apakah batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM dengan judul “Pengaruh Batas Akhir Tarif Pajak PP 55, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah batas akhir tarif pajak PP 55 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar?
2. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar?

4. Apakah batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar?

C. Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini akan membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu menyimpang dari topik pembahasan yang diteliti. Sehingga memusatkan permasalahan perpajakan yang diteliti di penelitian ini adalah batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan perpajakan yang baru terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM perorangan yang menggunakan tarif pajak PP 55 (0,5%), memiliki omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 dan telah melakukan usaha selama 7 tahun atau lebih di Kabupaten Gianyar.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh batas akhir tarif pajak PP 55 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.
- b. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

- d. Untuk mengetahui pengaruh batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan terdapat juga manfaat yang diberikan dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dan acuan bagi pelaku usaha dalam mengelola kegiatan bisnis, sekaligus menjadi pedoman dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berbasis digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian pada bidang yang relevan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta perbandingan bagi pemerintah dalam melakukan kajian secara komprehensif dalam menyusun peta peraturan dan sistem perpajakan Indonesia jangka menengah maupun panjang, sehingga dapat merumuskan kebijakan perpajakan dan menciptakan sistem perpajakan yang dapat menjamin kepastian, memberikan keadilan, efisiensi perpajakan.

2) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha UMKM serta dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali merupakan lembaga Pendidikan vokasi yang hadir dalam membantu instansi atau lembaga. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang kebijakan berakhirnya tarif pajak PP 55, sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta menjadi pertimbangan untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang perpajakan, dan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di Politeknik Negeri Bali.

4) Bagi Mahasiswa

Dari penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan Pendidikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali. Mampu menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan. Sehingga dapat dijadikannya referensi dan bahan rujukan oleh peneliti selanjutnya dalam mengerjakan penelitian yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut pembahasan dan hasil penelitian terkait pengaruh batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Batas akhir tarif pajak PP 55 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dikenakan, maka makin meningkat kepatuhan wajib pajak.
2. Modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Kondisi demikian menandakan bila semakin mudah dan manfaat yang diberikan sistem yang modern maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
3. Pengetahuan wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

4. Batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

B. Implikasi

Menurut pembahasan dan hasil penelitian yang sudah dijabarkan, implikasi dari studi ini adalah:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan tambahan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan perpajakan, serta studi aplikasi terkait dampak batas akhir tarif pajak PP 55, modernisasi sistem perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM dengan adanya tarif pajak PP 55 dan modernisasi sistem perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan lebih mengembangkan sistem perpajakan yang ada.

C. Saran

Menurut pembahasan dan hasil penelitian, sehingga saran yang bisa penulis berikan untuk dapat dipertimbangkan yaitu:

1. Bagi pelaku UMKM

Bagi wajib pajak UMKM di Bali khususnya Kabupaten Gianyar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakannya. Wajib pajak yang belum memanfaatkan sistem yang modern direkomendasikan untuk memanfaatkan sistem yang ada. Penggunaan sistem administrasi yang modern akan memudahkan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Serta akan lebih teliti dalam melaporkan pajaknya agar terhindar dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini masih memuat berbagai kekurangan, untuk itu pada penelitian mendatang diperlukan pengembangan yang lebih lanjut, seperti penambahan variabel lain, penambahan sampel serta memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organization Behavior And Human Decision Processes, 179–211.
- Ananda, Pasca, R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | 6(2): 2. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>.
- Anggraeni, Kiki, V., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 9(1): 96–108.
- Anugrah, Saesar M. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha* 6(1): 1–12.
- Ariyanto, Dwi, & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa* 8(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3): 26320–32.
- Barrios, S., Maftai, A., Narazani, E., & Varga, J. (2020). Progressive Tax Reforms in Flat Tax Countries. *Eastern European Economics* 58(2): 83–107.
- Cahyadi, Amelia, Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The Urgency of Reforming Indonesia's Tax Law in the Face of Economic Digitalization. *Cogent Social Sciences* 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>.
- Darmayasa, I. N., dan Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business and Management* 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>.
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3(2): 316–30.

- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). *E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Kajian Akuntansi* 4(2): 208.
- Fuadi, Oentari, A., & Mangonting, Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Haizumah, Fatin, S., & Hayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pamekasan. *Jurnal Cahaya Mandalika* 3(1): 17–29.
- Hastuti dan Puji (2021). Yayasan Kita Menulis *Kewirausahaan Dan Umkm*.
- Kirchler, Erich, Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The ‘Slippery Slope’ Framework. *Journal of Economic Psychology* 29(2): 210–25.
- Machali, Imam (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Marcelina, Ayu, D., & Nurhayati (2023). Menguji Hubungan Trust Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slippery Slope Framework Di Negara Oecd. *Jurnal Ekonomi Trisakti* 4(1): 81–92.
- Mayasari, Risa, and Narsa, I. M. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. 14.
- Mulyati, Yetti, & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. 4(2): 139–55.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge Requirements, Tax Complexity, Compliance Costs and Tax Compliance in Uganda. *Cogent Business and Management* 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(01): 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>

- Putra, R. J., dan Deri (2022). The Effect of Moral Liability , the Effectiveness of Tax Socialization , Aspects of Tax Law Enforcement and The Digitalization of Tax Services on Taxpayer Compliance with Nationalism as A Moderation Variable. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5(3): 19237–48. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5935>.
- Putra, Rahmat, R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan* 7(2): 34–41.
- Putri, Amara, D., and Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM* 6(2): 168–78.
- Riswanto, Ari, Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2020). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 4(3): 419–28.
- Sinuhaji, Latersia,V., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(4): 6974–90.
- Subhaktiyasa, G. P. (2024). Menentukan Populasi Dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. 9: 2721–31.
- Thahir, Nuryunita, A., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan* 5(2): 160–75.
- Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Wijaya, Sinta, V., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss* 6(1): 206–16.
- Yulia, Yosi, Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Sistem Informasi* 1(3): 60–69.
- Zulma dan Maulana, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia. *Ekonomis: Journal of*

Economics and Business 4(2): 288.

Zulma, Maulana, G. W., & Hizazi, A. (2020). The Relevance of E-Commerce Tax Application in Indonesia: Based on the Perspective of Taxation Expert. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi* 3(2): 94–108.

